ANALISIS PERAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Ayang Fristia Maulana¹, Ridwan Maulana², Idha Andini³, Nana Supriatna⁴, Winda Putri
Julianah⁵

fristia.maulna@gmail.com¹, ridwanmaulanatj@gmail.com², idhaandini23477@gmail.com³,
snana0586@gmail.com⁴, windaputrijulianah0@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan hukum perpajakan di Indonesia. Direktorat ini bekerja sama dengan lembaga lain, seperti kementerian pajak dan pendapatan, untuk memastikan interpretasi dan penerapan hukum yang ada di negara Indonesia yang tepat. Departemen perpajakan luar negeri juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu masyarakat memahami dan menjalankan suatu perundang-undangan yang membahas tentang perpajakan. Mereka memberikan informasi, bantuan dan pendidikan kepada masyarakat serta memantau dan juga dapat menegakkan kepatuhan terhadap suatu perundang-undangan.. Departemen Pajak telah memainkan peranan penting dalam menjaga keadilan dan keadilan dalam penyelenggaraan hukum perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak, penegakkan, perundang-undangan.

ABSTRACT

The Directorate General of Taxes (DJP) has an important role in implementing tax law in Indonesia. The foreign tax department also has the responsibility to help the public understand and implement legislation that discusses taxation. They provide information, assistance, and education to the public and monitor and can also enforce compliance with legislation. The Tax Department has played an important role in maintaining fairness and justice in the administration of tax laws in Indonesia.

Keywords: Tax, enforcement, legislation.

PENDAHULUAN

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. (E. Utrecht., 1959.). Pajak merupakan sebuah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, Prof. Dr.Rochmat , 2012).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Penegakkan hukum adalah suatu kegiatan yang hubungan dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam suatu kaidah-kaidah. (Soerjono Soekanto., 1983). Dalam arti luas, penegakkan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang sudah terkandung di dalamnya, dengan bunyi aturan formal maupun adanya nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut kepada suatu penegakkan pada peraturan yang formal dan tertulis saja. (Asshiddiqie, Jimly., 2012),

Terdapat 3 tujuan atau unsur utama dalam suatu penegakkan hukum, yang ada di Indonesia ialah : (Rahardjo, 1982)

1. Keadilan, dalam suatu penegakkan hukum pada perpajakan, ialah dapat memastikan bahwa setiap wajib pajak diperlakukan secara setara dan tanpa diskriminasi

2. Kepastian hukum, adalah prinsip yang menjamin bahwa aturan hukum yang mengatur perpajakan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.
3. Kemanfaatan dalam konteks hukum perpajakan mengacu pada sejauh mana penegakan hukum tersebut memberikan manfaat nyata, baik bagi negara maupun masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya yang sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan, ini Direktorat memiliki fungsi, sebagai :

1. Adanya pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
2. Adanya suatu penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan
3. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.

Adapula peran dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalani tugasnya guna penegakkan hukum, ialah :

1. Direktorat dapat melakukan suatu pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan pajak yang disampaikan wajib pajak akurat dan sesuai dengan kenyataan.
2. Direktorat dapat memiliki wewenang guna mengenakan sanksi administratif kepada wajib pajak yang tidak patuh, termasuk denda dan bunga atas keterlambatan atau ketidakbenaran dalam pelaporan pajak.
3. Dalam kasus pelanggaran berat, Direktorat dapat bekerja sama dengan penegak hukum lain untuk menindak secara pidana terhadap pelanggaran perpajakan yang serius, seperti penggelapan pajak.
4. Selain penindakan, Direktorat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensi hukum dari pelanggaran perpajakan.

Penegakkan hukum di bidang perpajakan, pastinya dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti :

1. Peraturan perpajakan yang rumit dapat menyulitkan pemahaman wajib pajak, yang pada suatu gilirannya dapat menyebabkan ketidakpatuhan baik sengaja maupun tidak sengaja.
2. Direktorat ini seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dalam hal jumlah petugas dan teknologi yang digunakan untuk pengawasan dan penegakan hukum.
3. Masalah korupsi dalam institusi perpajakan dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan juga adanya pemungutan pajak yang mempunyai suatu hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan suatu peraturan pada perundang-undangan yang berlaku. (Sumarsan, Thomas, 2017). Jenis pajak di bagi menjadi 3, yaitu adanya pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. (Resmi, Siti, 2014).

METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode hukum yuridis deskriptif yang merupakan menggambarkan pada suatu sifat yang dapat berlangsung pada saat penelitian dapat dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, yang berdasarkan pada perundang-undang. (Husein Umar., 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala dalam menegakkan hukum perpajakan

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana, Shant, 1998). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan hukum perpajakan di Indonesia. Kendala-kendala ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Kendala dari Internal, berupa :

- Kekurangan sumber daya manusia, ialah direktorat ini sering sekali menghadapi kekurangan pegawai yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus perpajakan yang kompleks. Keterbatasan jumlah pegawai dan kapasitas mereka dapat menghambat proses audit dan penegakan hukum.
- Meskipun telah ada upaya untuk modernisasi, sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh direktorat ini mungkin masih belum sepenuhnya terintegrasi dan optimal. Hal ini bisa dapat menghambat proses pengumpulan data, analisis, dan penindakan.
- Adanya birokrasi internal, ialah adanya suatu prosedur tentang birokrasi yang berbelit-belit di dalam direktorat ini, bisa dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan tindakan penegakan hukum.

2. Kendala pada eksternal, yaitu :

- Banyaknya ketidakpatuhan pada waji pajak, ialah banyaknya wajib pajak yang masih enggan untuk patuh dan juga mencari cara untuk menghindari pajak, baik melalui pelaporan yang tidak benar maupun dengan menggunakan celah hukum.
- Kurangnya kesadaran dan juga pendidikan tentang pentingnya pajak, ialah minimnya
- Keputusan terkait penegakkan hukum pajak kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh adanya tekanan politik dan kondisi ekonomi yang dapat menghambat tindakan yang tegas terhadap pelanggar pajak.
- Adanya kejahatan seperti korupsi dan kolusi antara oknum yang ada di Indonesia, ialah direktorat ini dengan wajib pajak bisa mengganggu integritas dan efektivitas penegakan hukum pajak.

3. Kendala hukum dan regulasi, ialah :

- Regulasi perpajakan yang ada mungkin memiliki kelemahan atau celah yang akan dimanfaatkan oleh para wajib pajak.
- Proses hukum di Indonesia yang cenderung lambat dapat menghambat penegakan hukum yang efektif. Kasus-kasus pajak sering memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan di pengadilan.
- Kurangnya sanksi yang efektif, ialah adanya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar pajak mungkin tidak cukup menimbulkan efek jera, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan.

4. Kendala teknis dan operasional, ialah :

- Ketersediaan akan suatu data yang akurat dan lengkap sangat penting untuk penegakan hukum perpajakan. Namun, direktorat ini sering sekali menghadapi masalah dengan data yang tidak akurat atau tidak lengkap.
- Adanya keterbatasan pada infrastruktur yang tidak dapat memadai, terutama yang berada di suatu daerah-daerah yang terpencil, ini dapat menghambat suatu pengawasan dan penegakkan hukum yang efektif.

B. Kolaborasi Direktorat dalam menangani kasus

Kolaborasi antara Direktorat dengan lembaga penegak hukum lainnya sangat penting dalam menangani kasus-kasus perpajakan di Indonesia. Bentuk kolaborasinya ialah sebagai berikut :

1. Melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian, ialah :

- Adanya kerjasama dengan pihak kepolisian, ialah direktorat ini sering sekali bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan investigasi terhadap kasus-kasus perpajakan yang melibatkan pelanggaran pidana, seperti penggelapan pajak.
 - Adanya pperasi gabungan antara direktorat dan kepolisian dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan perpajakan yang sering melibatkan tindak pidana lainnya.
2. Kolaborasi dengan kejaksaan, ialah :
 - Direktorat ini bisa bekerjasama dengan kejaksaan dalam suatu proses penuntutan pada kasus-kasus perpajakan. Kejaksaan berperan dalam membawa kasus perpajakan ke pengadilan dan memastikan pelanggar pajak mendapat sanksi yang sesuai.
 - Direktorat ini dapat menyediakan data dan bukti yang diperlukan oleh kejaksaan untuk memperkuat kasus di pengadilan.
 3. Kerjasama dengan komisi pemerantasan korupsi (KPK), ialah :
 - Direktorat ini bisa bekerja sama dengan KPK untuk mengatasi kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum petugas pajak dan wajib pajak. Kolaborasi ini mencakup penyelidikan dan penuntutan terhadap tindakan korupsi yang berhubungan dengan perpajakan.
 4. Kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dimana dalam melakukan sebuah audit terhadap instansi pemerintah dan badan usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.
 5. Kolaborasi dengan lembaga keuangan, yang dimana direktorat ini dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait, yang memiliki tujuan untuk memperoleh suatu informasi disektor keuangan.

Tantangan merupakan adanya suatu keadaan yang dihadapi untuk menggugah suatu kemampuan dalam melaksanakan adanya tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Supinah. , 2022). Tantangan dalam kolaborasi ini ialah, adanya koordinasi antar lembaga ialah adanya perbedaan pada prosedur dan birokrasi antar suatu lembaga dapat menghambat efektivitas kerja sama. Koordinasi yang tidak optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus, adanya suatu lembaga penegak hukum memiliki prioritas dan fokus yang berbeda, yang kadang-kadang bisa menyebabkan konflik kepentingan atau kurangnya perhatian pada kasus perpajakan.

Kolaborasi adalah bekerja sama khususnya dalam upaya menggabungkan pemikiran. (Gray, Barbara). Ada pula, manfaat dari kolaborasi, ialah :

- Kolaborasi memungkinkan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan terkoordinasi, sehingga meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus perpajakan.
- Dengan bekerja sama, direktorat dan suatu lembaga penegak hukum lainnya dapat berbagi sumber daya dan keahlian, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.
- Kolaborasi yang kuat dapat menciptakan efek jera yang lebih besar bagi wajib pajak yang melanggar, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.
- Adanya kerja sama antar lembaga memungkinkan pengawasan yang lebih baik dan lebih menyeluruh terhadap kegiatan perpajakan dan keuangan.

Ada beberapa contoh kasus dari akibat sukses pada suatu kolaborasi, yang di lakukan oleh direktorat, ialah :

- Ada beberapa operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi, ini adanya suatu dukungan yang dilakukan oleh direktorat, yang telah berhasil mengungkap suatu kasus-kasus korupsi dan penggelapan pajak yang signifikan.

- Adanya suatu kasus-kasus besar seperti skandal perpajakan oleh perusahaan besar sering ditangani dengan melalui kerja sama antara direktorat pada suatu kejaksaan, dan kepolisian, yang menunjukkan hasil yang signifikan dalam penegakan hukum.

Kolaborasi yang dilakukan oleh direktorat ini, memiliki berbagai upaya yang sangat penting dalam menegakkan hukum, ialah sebagai berikut :

- Salah satu bentuk nyata kolaborasi ini adalah adanya suatu pelaksanaan operasi yang dilakukan secara bersama yang bisa disebut sebagai “Operasi Tangkap Tangan” (OTT), yang bertujuan untuk menangkap wajib pajak atau pihak lain yang terlibat dalam praktik suap atau korupsi terkait pajak.
- Direktorat ini dapat bekerja sama dengan adanya kejaksaan dalam proses penuntutan kasus-kasus perpajakan. Kejaksaan berperan dalam menyiapkan dakwaan dan membawa kasus perpajakan ke pengadilan.
- Direktorat dan juga komisi pemberantasan korupsi (KPK), ini sering sekali mengadakan kolaborasi, ini dapat bertujuan guna menangani kasus korupsi yang dapat melibatkan pejabat pajak atau wajib pajak. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) ini dapat membantu dalam menyelesaikan suatu penyelidikan, penindakan, dan penyidikan kasus korupsi yang terkait dengan perpajakan.
- Direktorat ini juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait, ini ialah adanya suatu pertukaran pada informasi yang terkait dengan kejahatan pada perpajakan yang dilakukan di internasional dan juga adanya pelarian yang dilakukan oleh wajib pajak ke luar negeri.

KESIMPULAN

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya dari pajak ini ialah guna menutup biaya pada produksi barang dan jasa guna mencapai suatu kesejahteraan pada masyarakat (Soeparman Soemahamidjaja, 1964). Pajak di Indonesia merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pada suatu pembangunan dan pelayanan publik. Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh sejumlah perundang-undangan dan juga adanya peraturan yang mengatur berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh seluruh masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini memiliki peran yang sangat krusial dalam penegakkan hukum pada perpajakan yang ada di negara Indonesia. Direktorat ini, dapat dilakukan secara aktif guna mendorong kepatuhan pajak melalui berbagai mekanisme, termasuk kampanye penyadaran, penyediaan fasilitas perpajakan yang mudah diakses, dan pengawasan rutin terhadap masyarakat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang membahas tentang suatu perpajakan ini dapat ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (Muljono, Djoko, 2010).

Kendala dan kolaborasi pada direktorat perpajakan

Direktorat ini memiliki tujuan guna menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait, dan juga adanya suatu kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Adanya pertukaran informasi ini penting untuk mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak, dan juga direktorat ini ikut dalam partisipasi pada adanya suatu kerja sama yang dilakukan secara internasional dengan organisasi lainnya. Direktorat ini dapat menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan hukum pada perpajakan yang ada di negara Indonesia, termasuk rendahnya pada kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2012). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi.
- Dellyana, Shant. (1998). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- E. Utrecht,. (1959.). Pengantar dalam Hukum Indonesia Cetakan keenam. Jakarta: PT.Penerbit Balai Buku Ichtar.
- Gray, Barbara. (n.d.). Collaborating: Finding Common Ground Formultiparty Problems. San Francisco.
- Husein Umar,. (2009). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muljono, Djoko. (2010). Panduan Brevet Pajak :Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Andi.
- Rahardjo, G. R. (1982). Hukum dalam Perspektif Sosial. Bandung: Alumni.
- Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. . Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Prof. Dr.Rochmat . (2012). Perpajakan Teori dan Teknis. Bandung : Graha Ilmu.
- Soeparman Soemahamidjaja. (1964). Pajak Berdasarkan Asas Gotong- Royong. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Soerjono Soekanto,. (1983). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsan, Thomas. (2017). Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS. Indeks.
- Supinah. . (2022). Ketahanan Emosional Kemampuan Yang Harus Dimiliki. Praya: P41.